

INDISCHE SOCIAL DEMOCRATISCHE VERENIGING (ISDV) MERUPAKAN CIKAL BAKAL PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

Oleh: Yunani Hasan
Dosen Program Studi Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya

Intisari : Paham komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913 yang di perkenalkan oleh Hendricus Josephus Fransiscus Maria Sneevliet. Ia adalah mantan ketua gerakan buruh nasional di Belanda. Datang ke Indonesia awalnya bekerja di perusahaan gula di Jawa Timur. Pada tahun 1914 mendirikan Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV). Dua tahun kemudian ISDV berkembang sangat pesat dan dapat mempengaruhi rakyat khususnya kaum buruh di Indonesia, dengan mudahnya ia dapat mempengaruhi Sarikat Dagang Islam (SDI) dan akhirnya SDI berubah menjadi Sarikat Islam (SI) di bawah pimpinan Tjokroaminoto sehingga SI terpecah menjadi dua, yaitu : SI Merah dan SI Putih. Di lain pihak Tokoh-tokoh pemuda Indonesia cepat terpengaruh sehingga mereka bergabung dengan ISDV seperti Tan Malaka, Semaun, Darsono, dan Alimin Prawirodirjo. Pada tahun 1920 anggota sudah berjumlah 269 orang dan pada tahun 1920 ISDV di putuskan berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKI) dengan ketuanya Semaun wakilnya Darsono dan pengurus lainnya seperti Bregmsma, Dekker, dan Baars. Akan tetapi pada tahun 1926 terjadi gejolak di masyarakat, dimana PKI berhasil memanfaatkan Defresi ekonomi dan gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Karena anggotanya semakin banyak, akibatnya aksi-aksi anarkis dilakukan oleh anggota PKI baik di desa maupun di daerah-daerah lain. Dengan hancurnya PKI pada tahun 1927 sejak itu rakyat Jawa khususnya tidak lagi aktif berpolitik.

ABSTRAK

Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913 diperkenalkan oleh Hendricus Josephus Fransiscus Maria Sneevliet. Ia adalah mantan ketua Gerakan Buruh Nasional dan mantan pemimpin partai revolusioner di salah satu propinsi di negeri Belanda. Mula-mula ia bekerja sebagai wartawan perdagangan di Soerabajasche Handelshand milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur, tidak lama kemudian ia pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris di sebuah maskapai dagang (Depdiknas, 1995: 5). Sneevliet yang dilahirkan di Belanda pada tahun 1883 memulai karirnya sebagai seorang penganut mistik katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner, pada tahun 1914 Sneevliet mendirikan Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV) di Indonesia. ISDV dengan cepat akan menjadi partai komunis pertama di Asia yang berada di luar Uni Soviet. Pada awal berdirinya, anggota ISDV seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh dasar dikalangan rakyat Indonesia untuk dapat menyebarkan faham marxis. Oleh karena itu pada tahun 1916, ISDV menjalin persekutuan dengan Insulinde (merupakan organisasi politik yang didirikan oleh peranakan Belanda dan orang Belanda kelahiran Indonesia pada tahun 1907 di Bandung, pada awalnya Insulinde bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa peranakan Indonesia-Belanda tetapi pada tahun 1919 anggaran dasarnya diubah dan keanggotaan Insulinde di buka untuk semua bangsa kemudian kedudukannya dipindahkan dari Bandung ke Semarang). Anggota Insulinde berjumlah 6000 orang termasuk beberapa orang Jawa yang terkemuka, tetapi organisasi ini jelas bukanlah suatu alat yang ideal untuk memenuhi keinginan ISDV demi memperoleh dasar dikalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka perhatian ISDV mulai beralih kepada Sarekat Islam. Hal ini disebabkan karena Sarekat Islam memiliki jumlah pengikut yang besar dikalangan rakyat Indonesia (Ricklefs, 2005: 260-261).

Kata-kunci : Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI)

DV) A (PKI)

eh Hendricus
anda. Datang
ikan Indische
sat dan dapat
empengaruhi
wah pimpinan
k Tokoh-tokoh
i Tan Malaka,
ang dan pada
gan ketuanya
n tetapi pada
ni dan gejolak
rkis dilakukan
un 1927 sejak

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1912, seorang pedagang batik bernama Raden Mas Tirta Adi Suryo mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) di Jawa Barat. Pada awalnya SDI bertujuan untuk mengimbangi dominasi pedagang batik keturunan Cina dan menjalin hubungan yang erat antar pedagang batik pribumi. SDI terus berkembang hingga ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Di Surabaya, organisasi ini menarik perhatian seorang tokoh yang bernama Tjokroaminoto untuk bergabung dalam SDI. Demi mendapatkan keanggotaan yang luas bukan hanya dari kalangan para pedagang batik tetapi juga dari masyarakat yang beridentitas Islam, SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Di bawah pimpinan Tjokroaminoto, SI berkembang menjadi organisasi politik nasionalis-Islam yang memiliki ribuan anggota. Watak dan aktivitas SI ini rupanya diamati secara cermat oleh Sneevliet dan kawan-kawan, mereka berupaya mengeksploitasi sentimen anti kolonial dan kapitalisme asing dari pada pengikut SI dan ISDV berusaha mendekati SI (Depdiknas, 1995: 6).

2. Terbentuknya Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)

Menjelang dimulainya Perang Dunia I, seorang aktivis marxis berkebangsaan Belanda bernama Hendricus Josephus Maria Sneevliet dikirim oleh organisasi induknya di Rusia untuk menyebarkan faham marxis di Indonesia. Kedatangan Sneevliet pada tahun 1913 juga diikuti oleh kedatangan tokoh marxis lainnya, seperti JA. Brandsteder, Ir. A. Baars, Dr. Rinkes, C. Hartogh, P. Bergsma, HW. Dekker dan lainnya. Adanya pertentangan kelas antara bangsa penjajah (Belanda) dengan bangsa yang dijajah (Indonesia) serta timbulnya pertentangan antara tuan-tuan kebun (pemilik modal) dengan para pekerjanya (buruh) yang terjadi di Indonesia dianggap Sneevliet akan sangat menguntungkan apabila usaha penyebaran faham marxis dilakukan di Indonesia.

Setelah mempelajari keadaan yang terjadi di Indonesia, Sneevliet mengirim surat pada pusat komando komunis Internasional (Komintern) di Rusia yang isinya meminta Komintern untuk mengizinkan penyebaran faham marxis di Indonesia. Surat yang dikirimkan Sneevliet mendapat tanggapan dari pemimpin Komintern yang bernama Vladimir Ilyic Ulyanov (Lenin). Melalui kabar harian Komintern, Lenin memberikan persetujuan dengan mengatakan "Suatu perkembangan penting adalah penyebaran gerakan demokratis revolusioner di Hindia Belanda, di Jawa dan kepulauan lainnya yang berpenduduk kira-kira 41 juta jiwa".

Sneevliet merupakan pemimpin organisasi

buruh transportasi dan juga anggota Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di Belanda. Selanjutnya atas keberhasilan revolusi komunis di Rusia, SDAP berubah menjadi Partai Komunis Belanda. Di Indonesia, awalnya Sneevliet bekerja sebagai staf redaksi warta perdagangan Soerabajasche Handelsblad (sebuah surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur). Kemudian ia pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris pada surat kabar Semarangse Handels Vereniging. Saat itu di Semarang telah berdiri Organisasi Buruh Kereta Api (VSTP: Vereniging Spoor En Tramweg Personeel).

Sambil bekerja, Sneevliet giat melakukan infiltrasi (penyusupan) ke dalam VSTP. Dalam waktu singkat ia berhasil menanamkan pengaruhnya dan menjadikan VSTP sebagai alat propaganda dari faham marxis di Indonesia melalui surat kabarnya yang bernama De Volharding (keyakinan). Pada tahun 1914, Sneevliet bersama kawan-kawannya berhasil mendirikan organisasi marxis pertama di Asia Tenggara yang diberi nama Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) yang berpusat di Semarang (Hartisekar-Akrin, 2001: 66-70).

Sneevliet dengan ISDV nya yang bersifat sosialis, melakukan usaha untuk mendekati rakyat umum dengan jalan memakai organisasi lain sebagai perantara. Ini dikarenakan ISDV tidak dapat bersandar kepada rakyat umum, Sneevliet menugaskan para aktivis ISDV berkebangsaan Belanda seperti Bandsteder, Ir. Baars, dan Van Burink untuk mendekati serdadu angkatan laut dan pegawai sipil bangsa Belanda, sedangkan anggota ISDV bangsa Indonesia seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo ditugaskan untuk masuk ke dalam SI, bahkan di dalam SI mereka berhasil mendapat kedudukan dan dapat menentang pemimpin-pemimpin SI seperti Tjokroaminoto (Pringgodigdo, 1991: 28).

Bersamaan dengan tahun berdirinya, ISDV menerbitkan majalah pergerakan Het Vrije Woord (Suara Kebebasan) di Surabaya. Selain itu, ISDV juga menerbitkan surat kabar Soeara Merdeka dan Soeara Rakyat. Tokoh marxis seperti Sneevliet memandang bahwa propaganda/penyebaran faham komunis sangat penting. Dan orang-orang komunis senantiasa memanfaatkan media massa seperti koran dan majalah sebagai alat propaganda. Bersamaan dengan itu, di Indonesia telah berdiri sebuah organisasi besar bernama Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI). Sneevliet sangat tertarik untuk mempelajari SI, sebab dalam waktu yang singkat SI sangat berhasil menjadi organisasi massa dengan anggota lebih dari 1,5 juta orang. Oleh sebab itu, ia berpikir keras untuk bisa menginfiltrasi dan memanfaatkan SI dari dalam (Hartisekar, 2001: 67-68).

Pada tahun 1914, seorang aktivis ISDV berkebangsaan Indonesia yang bernama Semaun menjadi anggota SI cabang Surabaya, dua tahun kemudian pada

tahun 1916 Semaun pindah ke Semarang dan bergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP: Vereniging Spoor En Tamweg Personeel) (Rickfles, 2005: 262).

Pada tahun 1916 ini, Semaun menentang sikap pengurus SI di dalam Kongrés SI yang diadakan di Bandung. Di tahun 1917, pengaruh Semaun di dalam SI semakin kuat. Melalui pemilihan yang dilakukan SI cabang Semarang pada tahun itu, Semaun berhasil ditetapkan sebagai pemimpin SI cabang Semarang. Dengan kedudukannya, Semaun dengan lebih baik lagi dapat mempergunakan pengaruhnya di dalam SI. Di tahun 1918, Semaun mendapat kedudukan sebagai kornisaris pengurus besar Sarekat Islam mewakili SI Semarang. Tjokroaminoto dan beberapa tokoh pemimpin SI lainnya seperti Agus Salim berusaha mengatasi Semaun dan pengaruh sosialisnya di dalam tubuh SI. Oleh karena itu, terdapat dalam Anggaran Dasar SI yaitu suatu dasar perjuangan menentang kapitalisme yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kelompok Semaun. Hal ini dilakukan Tjokroaminoto untuk menghindari perpecahan di dalam tubuh SI (Pringgogidgo, 1991: 28).

Pada waktu dimulainya Perang Dunia I (1914-1918) hal itu juga menandai dimulainya zaman kegiatan politik bergejolak di Indonesia, dikarenakan terganggunya aktivitas perekonomian di Indonesia sebagai dampak dari Perang Dunia I. Di tengah-tengah keadaan yang kacau muncul suatu masalah politik yang besar, dimana partai-partai Indonesia, baru memainkan peran penting. Ini berkaitan erat dengan usul pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat (Rickfles, 2005: 262).

Pada bulan Desember 1916, Rancangan Undang-Undang pembentukan Volksraad disetujui oleh pemerintah Belanda. SI mendapat kesempatan untuk bergabung dan duduk dalam Volksraad, tetapi disaat yang bersamaan pengaruh komunis terlihat semakin jelas di dalam tubuh SI. Suatu bentuk perlawanan yang bersifat radikal mulai ditunjukkan oleh Semaun melalui SI cabang Semarang, Semaun menentang peranan SI untuk duduk di dalam Volksraad bahkan pada kongres yang diadakan SI pada tahun 1917, kelompok radikal yang di motori oleh Semaun memperoleh dukungan yang sangat besar untuk menentang peranan SI di dalam Volksraad.

Tjokroaminoto sebagai pemimpin SI merasa takut akan terjadinya perpecahan dalam tubuh SI yang terlihat dalam pertentangan atas keikutsertaan SI dalam Volksraad. Tjokroaminoto bahkan setuju melontarkan kecaman-kecaman terhadap kapitalisme asing. Abdul Muis yang merupakan wakil SI didalam delegasi yang pernah berkunjung ke negeri Belanda juga mengatakan sama dengan Tjokroaminoto, bahkan ia mengatakan : "Bila ternyata Volksraad gagal SI akan memberontak".

Tahun 1918, pemilihan anggota Volksraad diumumkan, Abdul Muis dari CSI dan seorang anggota

Insulinde Abdul Rivai berhasil terpilih dan duduk di Volksraad bersama para bupati dan pejabat-pejabat lainnya. Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tidak puas dengan hasil ini, dia menggunakan haknya untuk mengangkat Tjokroaminoto dari SI dan Tjipto Mangun Kusumo (yang telah kembali dari pengasingan). Hal ini dilakukannya dengan harapan dapat melibatkan lebih banyak kekuatan radikal di dalam Volksraad dan membawa kekuatan radikal tersebut pada pendekatan yang bersifat kerjasama dengan pemerintahan Kolonial Belanda. Kini ISDV mulai merasa cemas bahwa Volksraad mungkin akan terbukti berhasil dan menjauhkan orang-orang Indonesia yang progresif dari aliran kiri (sosialis) yang ekstrim.

Pada bulan November 1918 di era politik Perang Dunia I mencapai puncaknya dan Van Limburg Stirum memberikan kesempatan untuk mendukung pembaharuan lebih lanjut di Indonesia dengan memberikan janji di depan Volksraad yang disebut dengan janji-janji November yang isinya pemerintah akan melakukan pembaharuan dalam ketatanegaraan yang didalamnya Volksraad akan menjadi suatu bagian terpenting dari pemerintahan dan ikut serta dalam bertanggungjawab secara nyata dan memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah yang menyetujui pengalihan wewenang selanjutnya ke pada Volksraad dan perbaikan-perbaikan sosial lainnya kepada Volksraad sehingga Volksraad terlihat semakin memberi harapan (Rickfles, 2005: 262).

Usaha-usaha Semaun agar Sarekat Islam tidak duduk dalam Volksraad menjadi sia-sia Semaun berkata: "Volksraad hanya suatu pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis untuk mengelabui mata rakyat jelata, demi memperoleh untung lebih banyak". Abdul Muis juga berpendapat bahwa : "Turut duduknya dia dalam Volksraad adalah sambil berusaha lambat laun akan mengubah Volksraad menjadi sebuah parlemen sejati".

Dengan pembentukan Volksraad yang beralih untuk kepentingan rakyat dan adanya hak merdeka berbicara (kemerdekaan berbicara serta hak bersidang dan hak berkumpul untuk pergerakan politik diadakan berhubung dengan lahirnya Volksraad) di Indonesia tidak bisa dihindarkan, tetapi di dalam SI semua itu selalu dapat tantangan dari golongan Semaun. Itu merupakan suatu contoh bahwa pengaruh ISDV dalam tubuh SI tidak dapat dipungkiri.

Oleh karena itu, SI menggabungkan diri dengan Radicale Contretrae (Semacam fraksi dalam lembaga wakil rakyat yang menuntut agar pemerintah kolonial membentuk suatu parlemen yang wujud, status, isi, dan kekuasaannya harus berbeda dengan parlemen bentukan pemerintah kolonial Belanda) yang didirikan pada tanggal 16 November tahun 1918 (Pringgogidgo, 1991: 8).

Radicale Contrentrae merupakan semacam fraksi di dalam tubuh Volksraad yang di prakarsai oleh golongan sosialis dalam tubuh SI, yang terdiri dari SI dan Indische Partij.

Pemerintah kolonial meninggalkan faham liberal di tahun 1919, karena pemerintah menyadari segala sesuatunya mulai tidak terkendalikan. Sejak Revolusi Rusia tahun 1917, ISDV telah menjadi badan komunis yang lebih nyata di Hindia Belanda (Indonesia). ISDV berhasil menghimpun sebanyak 3000 orang serdadu dan kłasi (awak kapal) ke dalam dewan-dewan bernama ISDV. Dan tahun 1919 pemerintah Hindia Belanda membubarkan dewan-dewan itu, mengasingkan Steevliet dan orang-orang Belanda lainnya yang terlibat dalam ISDV, ketika orang-orang Belanda yang radikal menghilang dari ISDV maka pimpinan ISDV jatuh pada orang-orang Indonesia yang dengan cepat akan membuat partai ini mendapatkan basis massanya (Rickfles, 2005: 266).

Dengan lenyapnya pemimpin-pemimpin Eropa, maka muncul pemimpin-pemimpin Indonesia di dalam ISDV yaitu Semaun dan Darsono. Pada tahun 1919, pemimpin-pemimpin ISDV di bantu dengan keadaan ekonomi yang buruk benar-benar dapat mempengaruhi SI secara radikal. Di berbagai daerah timbul beberapa kegelisahan yang ditimbulkan oleh anggota-anggota SI. Oleh karena itu, pemerintah kolonial bertindak keras kepada SI yang dipandang akan mengancam keamanan. Atas tindakan pemerintah kolonial itu, ISDV tidak mungkin memperluas pengaruhnya di dalam SI. Namun demikian, pengaruh ISDV di dalam SI bulan Oktober 1919, ketika SI memperlihatkan diri sebagai pihak yang paling anti pemerintah dalam sejarahnya. Dan disinilah diputuskan untuk mendirikan persatuan pergerakan kaum buruh (PPKB) yang diketuai Semaun (Poezo, 1988: 167). Lingkungan politik berbalik menentang radikalisme tetapi ironisnya keadaan ini menempatkan ISDV dalam posisi memimpin gerakan politik. ISDV berada di tangan Semaun, dengan jumlah anggota 269 orang pada tahun 1920 tetapi sekarang sebagian besar anggotanya adalah orang Indonesia (Rickfles, 2005: 265).

ISDV menyatakan simpatinya pada partai komunis Internasional (Komintern). Dan pada kongres bulan Mei 1920, diputuskan untuk mengganti nama ISDV menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Salah seorang pembentuk terbentuknya PKI adalah Ir. Baars yang dalam bulan Maret 1920 kembali ke Indonesia. Di dalam kongres ini berakhir pengaruh orang-orang marxis Eropa yang ekstriner. Dalam pengurus partai komunis yang baru ini (PKI), Semaun menjabat sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Bergsma, Dekker, dan Baars masing-masing menjadi sekretaris, bendaharawan, dan anggota. Untuk pertama kalinya orang-orang Indonesia menjadi pemimpin partai pada tingkat tertinggi (Pozoe, 1988: 167).

2. Lahirnya Partai Komunis Indoseia (PKI)

Kegiatan Perserikatan Komunis di Indonesia yang radikal, menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengasingkan Tan malaka ke timur kupang, ia yang menjabat sebagai ketua perserikatan komunis di Hindia, dimana setahun sebelumnya, Semaun dan Darsono (yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Perserikatan Komunis Hindia serta berberapa kaum radikal marxis) telah diusir keluar dari Indonesia. Tokoh-tokoh PKI lainnya seperti Alimin, Muso dan Sardjono lari ke Singapura. Tetapi semaun dan Darsono, pada tahun itu juga berhasil masuk kembali ke Indonesi melalui penyamaran. Dengan cepat mereka berdua menggelar langkah-langkah konsolidasi, cabang-cabang perserikatan komunis bertambah luas dan pada bulan juni 1924 Perserikatan Komunis di Hindia menggelar kongres di jakarta. Dalam kongres itu, di sepakati untuk mengubah nama Perserikatan Komunis di Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Usaha kader-kader Komunis yang militan akhirnya membuat PKI menjadi partai politik yang terbesar. Pada kongres PKI bulan Desember 1924 di Kota Yogyakarta, Sarekat Rakyat (cabang-cabang SI yang telah di pengaruhi golongan sosialis komunis) menggabungkan diri ke dalam PKI. Ketika itu kaum pergerakan nasional sedang giat-giatnya memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialis Belanda. Momentum tersebut dimanfaatkan PKI untuk memenuhi tujuan politiknya. Setelah berhasil menyusup ke dalam SI dan memiliki massa dari beberapa cabang SI, PKI beralih telah memiliki massa rakyat. Upaya PKI tersebut, berhasil mencetuskan pergolakan rakyat diberbagai tempat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa dalam bentuk pemogokan-pemogokan dan kekacauan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh dan petani (Harisekar-Akrin, 2001: 74-76).

Sejak tahun 1914 sampai dengan 1927 terjadi pergolakan harga-harga dalam hasil-hasil produksi Hindia Belanda (Indonesia) di pasaran dunia. Tahun-tahun masa Perang Dunia I mengakibatkan pemerintahan kolonial menutup rapat bahan-bahan di dalam gudang dan mengurangi hasil-hasil perkebunan dengan batas-batas minimum, kebijakan pemerintah kolonial mengharuskan rakyat Indonesia menjuruskan perhatiannya kembali kepada penghasilan bahan makanan sendiri. Akhir Perang Dunia I memperlihatkan dua tahun kemakmuran yang besar bagi para eksportir Barat khususnya ketika Dunia membutuhkan dan menginginkan hasil-hasil dari Hindia Belanda (Indonesia) dan pelaku Ekonomi Barat (Belanda) telah mendapat untung yang banyak. Sejumlah orang Indonesia, khususnya kaum pengusaha pertanian, ikut

merasakan kemakmuran, tetapi mayoritas buruh yang terikat pada ekonomi Barat telah merasakan bahwa setiap keuntungan tipis yang mereka peroleh diserap oleh naiknya ongkos-ongkos kebutuhan sehari-hari. Sejak tahun 1920, ekspor mulai mendapat proporsi yang normal dan harga-harga pasaran dunia mulai merurun dari titiknya yang tertinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar dari pihak pelaku ekonomi di Hindia Belanda (Indonesia) yang berada di tangan orang Barat, yang menyebabkan banyaknya terjadi kebangkrutan. Ketika Fock datang ke Hindia (Indonesia) dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1921, Fock memulai jabatannya dengan mencoba menyeimbangkan anggaran negara pemerintah kolonial dengan memberlakukan serangkaian kebijakan keuangan, yaitu memangkas habis pengeluaran sekitar pemerintahan dan menggenjot kenaikan pajak. Kebijakan ekonomi Fock mendapat tantangan dari kaum pergerakan bumi putera, hal ini disebabkan karena sikap liberal Gubernur Jendral Fock yang cenderung otoriter. Dalam pandangan Fock, kesejahteraan Hindia (Indonesia) di pandang dari keberhasilan bisnis yang diusahakan oleh orang-orang Belanda dan itu akan berhasil jika ekspor setiap tahun dari Indonesia meningkat. Apa yang dilakukan Fock telah membuat resah golongan pribumi, rencana PHK dan pemotongan upah (sebagai upaya mengurangi pengeluaran pemerintah kolonial), telah mengancam nasib buruh-buruh pegadaian sejak tahun pertama Fock menjabat. Orang Indonesia kembali menanggung akibatnya dengan upah yang dipotong lebih cepat dari pada turunnya standar hidup. Kesukaran-kesukaran yang dialami rakyat Indonesia dalam ikatan ekonomi kolonial membuat orang Indonesia harus dapat mencari jalan keluar dari hidup yang terus berubah dengan menumpahkan perhatian khusus untuk mengusahakan tanah miliknya, tetapi hal ini tidak mungkin bagi semua orang karena tidak semua rakyat mempunyai tanah. Sejumlah rakyat Indonesia inilah yang akan membentuk dasar sebagai pelaku gerakan aksi perlawanan untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial hingga tahun 1927 (Niel, 1984: 247-248).

Kondisi perekonomian di Indonesia yang tidak stabil sejak awal Perang Dunia I maupun gejolak ekonomi yang muncul sesudah berakhirnya Perang Dunia I sampai tahun 1927, telah memberikan kesempatan kepada kaum kamunis untuk dapat memanfaatkan kondisi yang terjadi di Indonesia. Dalam keadaan perekonomian yang penuh gejolak serta adanya kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung membebani rakyat Indonesia, tokoh-tokoh komunis berupaya melakukan tindakan dengan mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh, petani, dan pegawai sipil. Aksi-aksi itu berupa pemogokan dan penentangan terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan kolonial dengan alasan untuk menuntut kesejahteraan rakyat.

Setelah menunggangi banyak aksi-aksi pemogokan buruh dan menimbulkan kekacauan di pedesaan, pemerintah mulai mewaspadaai aktivitas PKI. PKI semakin mendapat ancaman ketika pada awal tahun 1925 rapat-rapat mereka diserang dan anggotanya diancam oleh kelompok yang menamakan diri Sarekat Hijau, kelompok ini terdiri dari para pejabat, polisi dan kiyai yang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan pemerintah terhadap PKI semakin diperketat dan pimpinan-pimpinannya sering ditahan pihak pemerintah kolonial.

Usaha PKI untuk mengorganisir kekuatan buruh tidak berhenti meskipun Semaun sebagai pemimpin PKI telah diasingkan keluar Indonesia. Pemimpin serikat buruh yang dipengaruhi PKI mengadakan pertemuan pada tanggal 20-21 Desember 1924 di Surabaya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa semua serikat buruh yang ada dibawah naungan PKI akan bergabung menjadi satu didalam suatu wadah yang diberi nama Serikat Kelompok Buruh Merah Indonesia dibawah pimpinan Ali Archam pada bulan Februari 1925. Serikat buruh laut dan pelabuhan, serikat pegawai pelabuhan dan laut (SPPL) bergabung dengan serikat kelompok buruh merah Indonesia, VSTP, PFB, dan Serikat Pegawai Postel yang sudah hancur akibat pemogokan berusaha dihidupkan kembali oleh Ali Archam, tetapi penyatuan itu berdampak negatif karena buruh mulai resah akibat keresahan dan rasa tidak puas terhadap kebijakan ekonomi Fock. Para buruh mendesak serikat buruh merah Indonesia untuk melakukan pemogokan demi perbaikan nasib para buruh, bahkan buruh yang sudah tergabung didalam serikat kelompok buruh merah Indonesia melakukan pemogokan secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pemimpinnya yaitu Ali Archam. Sejak pertengahan tahun 1925 buruh terus melakukan pemogokan, baik itu buruh pelabuhan, perawat, buruh cetak di Semarang, buruh cetak di Batavia maupun Bandung dan buruh bengkel di Surabaya, mereka melakukan pemogokan sendiri-sendiri. Pemerintah bertindak tegas dengan memberlakukan pemecatan terhadap buruh-buruh yang mogok, selain itu sisa-sisa propagandis dan pemimpin serikat buruh ditangkap, yang mengakibatkan hancurnya serikat-serikat buruh yang dipimpin oleh kaum komunis. Ali Archam (komisaris PKI), Mardjahan (komisaris PKI) dan Darsono ditangkap dan diasingkan keluar Indonesia. Selain itu pemerintah mencabut hak berkumpul bagi PKI, SR, VSTP dan Serikat buruh yang terlibat aksi pemogokan (Depdiknas, 1995: 32-35).

Pemogokan pada tahun 1925 yang diprakarsai PKI menjadi suatu petaka bagi PKI sendiri, akibat pemogokan itu polisi mulai membubarkan rapat-rapat PKI dan menangkap oknum pemimpinnya pada bulan Desember 1925. Darsono dan pimpinan PKI lainnya ditangkap. Darsono diasingkan keluar Indonesia tetapi ia

aksi-aksi kecacauan di aktivitas PKI. Pada awal tahun anggotanya diri Sarekat, polisi dan pemerintah kolonial PKI semakin sering ditahan

kekuatan buruh pemimpin PKI pertemuan di Surabaya. bahwa semua PKI akan yang diberi 1925. Serikat pelabuhan dan kelompok buruh Pegawai Postel berusaha penyatuan itu resah akibat kebijakan buruh merah demi perbaikan tergabung Indonesia sendiri tanpa yaitu Ali 5 buruh terus pelabuhan, di Batavia mereka. Pemerintah pemecatan itu sisa-sisa ditangkap, yang buruh yang komisioner ditangkap itu pemerintah SR, VSTP dan (Depdiknas,

memilih untuk pergi ke Rusia sedangkan tokoh PKI lainnya lari ke Singapura, tetapi PKI masih cukup menarik bagi masyarakat pedesaan dengan tampilan PKI yang jauh dari teori marxis sebenarnya. Di tangan rakyat pedesaan PKI cenderung tampil dengan gaya lokal pedesaan dan cenderung diselaraskan dengan agama melalui propaganda yang telah disebar oleh H. Mischbach (seorang sosialis agama), sisa-sisa pimpinan PKI kembali melakukan usaha menyatukan kekuatan mereka, tetapi cabang-cabang PKI dan SR bertindak tidak terkontrol dengan menciptakan kecacauan-kecacauan diluar perintah PKI pusat, pemerintah bertindak tegas dengan berusaha menangkap tokoh-tokoh PKI yang tersisa. Pertikaian antara pimpinan PKI dipengasingan dengan pimpinan-pimpinan PKI yang ada di Indonesia membuat PKI semakin terpecah tanpa koordinasi yang baik. Pihak pemerintah kolonial Belanda berhasil memanfaatkan situasi yang kacau di dalam tubuh PKI sebaik mungkin untuk segera melakukan tindakan antisipasi serta meredamnya sebelum PKI bertindak lebih jauh dan dapat mengancam posisi pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia (Depdiknas, 1995: 34-36).

Memasnya suasana politik yang ada di Indonesia membuat posisi PKI benar benar menjadi organisasi yang berpengaruh di dalam pergerakan, dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil sebagai akibat depresi ekonomi, serta sikap pemerintah kolonial di Indonesia yang dipimpin Gubernur Jendral Fock yang bersikap keras dan anti pada pergerakan, PKI seolah-olah menjadi satu-satunya organisasi yang berani secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, itu terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh PKI yang di tangkap dan di asingkan keluar dari Indonesia dikarenakan keterlibatan mereka dalam berbagai aksi pemogokan yang dilakukan kaum buruh dan serikat pekerja yang dianggap pemerintah kolonial Belanda dapat mengancam posisi pemerintah.

Keberanian tokoh-tokoh PKI tersebut menjadikan PKI sebagai organisasi yang dianggap dapat menjadi pemimpin pergerakan. Hal ini membuat rakyat tertarik untuk bergabung, meskipun mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan PKI yang sebenarnya. Adanya depresi ekonomi yang dirasakan semakin menyengsarakan rakyat dan kerasnya kebijakan pemerintah yang selalu mengkaitkan apapun yang terjadi dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengancam kehidupan pemerintah kolonial. Hal ini semakin membuat muncul terjadi kemarahan dikalangan rakyat, harapan mereka kini bergantung pada aksi revolusioner PKI, mereka beranggapan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan ini semua adalah melalui upaya perjuangan terhadap pemerintah pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia dan mereka menganggap bahwa PKI dengan sikap revolusionernya yang dapat melakukan perlawanan.

3. Kehancuran Partai Komunis Indoseia (PKI)

Pada tahun 1924 pemerintah Kolonial Belanda menutup sekolah-sekolah yang di kelola oleh Serikat Rakyat, akibatnya rakyat yang mempergunakan sekolah-sekolah itu melawan demi mempertahankan sekolah itu. Dengan adanya perlawanan rakyat PKI mendapat keuntungan politik, walaupun yang melakukan perlawanan itu sebagian besar bukan anggota PKI.

Pada tanggal 11-17 Desember 1924 PKI mengadakan Kongres di Yogyakarta yang membahas aksi umum berhubungan dengan keputusan partai terhadap pergerakan. Kongres PKI di Yogyakarta di hadiri oleh utusan-utusan 38 cabang PKI yang mewakili 1.237 anggota PKI dan 46 cabang Sarekat Rakyat yang mewakili 33.748 anggota SR. Hasil dari kongres besar PKI tersebut adalah di putuskannya langkah-langkah aksi untuk memperkuat barisan itu sendiri (PKI untuk bersiap-siap melakukan Revolusi yang bertujuan untuk mengadakan aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 (Pringgogidgo, 1991:36).

Keputusan itu di ambil dikarenakan pengurus besar PKI (Sarjono, Budi Sucitro, Alimin, dan beberapa pengurus PKI lainnya) menganggap bahwa keadaan sudah semakin genting, pemerintah kolonial melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap tokoh-tokoh PKI maupun SR sebagai pemimpin perjuangan anti kolonial. PKI sekarang harus menghadapi tindakan penindasan oleh pemerintah secara langsung, atas tindakan apapun yang di lakukan oleh tokoh PKI dapat langsung dikenakan tahanan. Selain itu rakyat juga tidak akan tertarik pada PKI apabila tidak ada aksi yang di lakukan (Wild, 1986:29).

Sebelum aksi perlawanan dilaksanakan PKI harus mengadakan aksi pemogokan, kemudian aksi bersenjata. Kaum tani harus di persenjatai dan tentara harus dilibatkan dalam aksi perlawanan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 1926, inilah yang menjadi keputusan kongres PKI yang dilaksanakan di Jogjakarta.

Tan Malaka yang berada di Cina mendengar hasil kongres besar tersebut dan dia menolak hasil kongres itu, bahkan Tan Malaka meminta hasil kongres itu dicabut, dikarenakan baik ditinjau dari segi organisasi maupun rencana dirasakan belum matang. Tan Malaka menekankan perlunya aksi masa yang terus menerus, mulai dari tingkat lokal hingga diangkat nasional dan baru kemudian berpuncak pada revolusi.

Beberapa bulan setelah dilaksanakannya kongres besar PKI di Yogyakarta, Alimin dan Muso pergi ke Rusia untuk menemui pimpinan pusat komintern, sementara itu para pemimpin yang tinggal di Indonesia

kehilangan pegangan dan menjadi panik. Saat dorongan untuk melakukan aksi semakin kuat dari rakyat yang telah mengalami rasa penderitaan akibat depresi ekonomi dan kerusuhan, selain itu hilangnya sebagian besar pemimpin PKI yang berpengalaman dan bersifat moderat menyebabkan PKI berada ditangan kaum muda yang cenderung berpikir panas. Tokoh-tokoh kaum muda PKI itu diantaranya Dahlan, Sukrawinata, Baharudin Saleh, Mahmudi dan Abu Bakar. Selama satu setengah tahun setelah kongres besar di Yogyakarta, PKI semakin dipengaruhi oleh dorongan-dorongan anarkis, PKI lebih menuruti keinginan naluri memberontak dari pada mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki (Wild, 1986: 31).

Para pemimpin muda PKI mendirikan komite aksi pemberontakan di Batavia, organisasi ini sebenarnya berada diluar PKI. Hal ini menyebabkan koordinasi antara pemimpin pusat PKI dan para pemimpin muda tidak terjalin baik. Beberapa orang pemimpin yang dipercayai oleh PKI telah berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu sebagian pemimpin-pemimpin cabang PKI dan SR yang putus asa dengan keadaan mengundurkan diri, dalam keadaan demikian PKI tetap melaksanakan aksinya yang telah direncanakan (Sagimun, 1986: 34-35).

Di akhir tahun 1926 tanpa koordinasi dengan pimpinannya yang ada di pengasingan PKI mulai melakukan aksi, (12-14 November 1926 di Jakarta, Jatinegara, dan Tangerang, 12-15 Desember 1926 di Kerésidenan Banten, 12-18 November 1926 di Priangan, 17-23 November 1926 di daerah Solo, 12-15 Desember 1926 di Kediri), aksi-aksi itu dapat terjadi dikarenakan tidak adanya Semaun dan Darsono yang selalu menghalangi terjadinya revolusi yang dianggap prematur dan terlalu cepat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menggiatkan propaganda komunis di seluruh daerah cabang PKI, aktivis-aktivis PKI di Batavia mendatangi rumah-rumah penduduk, pintu demi pintu diketuk dan setiap rumah disuruh membeli karcis merah harganya lebih kurang setengah Gulden. Mereka yang telah membeli karcis itu ditunjukkan untuk melakukan huru hara, tepatnya pada tanggal 12 dan 13 November 1926. Penjara Glodok dan Salemba diserang, rumah kediaman Gubernur Jendral ditembak. Rencananya akan terjadi pula pemberontakan di Banyumas, Pekalongan, Serata Kedu yang telah disiapkan satu minggu sebelumnya atas perintah pusat Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kota Semarang (Depdiknas, 1983: 50).

Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan tegas, tanggal 1 Desember 1926 sebanyak 106 pemegang karcis merah dari Tanah Abang dan karet digiring ke kantor Kabupaten Molenvliet daerah Weltevreden (Gambir). Para pimpinan pusat PKI menyelamatkan diri ke Rusia. Sebelumnya bersama

Alimin di Singapura, sementara Tan Malaka di Manila.

Orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pengrusakan Telepon dan Telegraf di Serang, rel kereta api di Banten dibongkar orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang duduk di CDO (College Dictator Organistic) ditangkapi. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) lebih dulu ditangkapi sebelum meletusnya pemberontakan yaitu Darsono, Ali Archam dan Mordjoha untuk diasingkan keluar Indonesia, sedang Alimin lebih awal dengan kemauan sendiri pergi ke Rusia pada pertengahan tahun 1925. Dan pada tanggal 17 November 1925 kawan-kawan Alimin yang tertinggal di tangkap (Depdiknas, 1983: 19-20).

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum komunis tersebut merupakan suatu tindakan yang tergesa-gesa dari pada dianggap sebagai suatu percobaan perebutan kekuasaan. Aksi tersebut mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda dikarenakan PKI pada waktu itu sudah begitu lemah akibat dari tindakan pemerintah yang melakukan tekanan dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI yang dianggap berpengalaman, sehingga pemberontakan itu tidak terkoordinasi dan bersifat lokal. Pemerintah kemudian melakukan suatu kebijakan reaksioner terhadap tindakan dan aksi yang dilakukan PKI sehingga PKI ditindas secara besar-besaran hingga akhirnya PKI hancur (Wild, 1986: 31).

Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk meredam situasi kacau yang di timbulkan PKI. Partai PKI hancur oleh penangkapan masal, pemenjaraan dan pembuangan. 13.000 orang ditangkap. Beberapa ditembak karena terlibat pembunuhan 5.000 orang ditempatkan dipenjara pencegahan, 4.500 orang dipenjara sesudah pengadilan, 6.700 orang dibebaskan setelah penahanan introgasi singkat, sisanya 1.300 orang dibuang di Bovendigul tempat pengasingan yang secara khusus dibangun untuk mereka.

Dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) maka berlangsungnya zaman penjajahan berakhir pula dua hal lainnya hingga perang dunia II, rakyat pedesaan tidak pernah lagi memainkan peran aktif dalam pergolakan politik. Dan pihak Belanda juga tidak pernah lagi bersifat toleran terhadap gerakan-gerakan anti penjajahan yang bersifat radikal dalam waktu yang lama. Pandangan-pandangan yang konservatif dikalangan penjajah Belanda sebagian besar telah menang dengan mutlak. Kebangkitan nasional pertama berakhir ketika goncangan yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI dengan kegagalan totalnya yang berakhir dengan tragis (Poeze, 1997: 174).

Daftar Pustaka :

- Depdiknas. 1995.
Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I Perkembangan
- Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948).
Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Gonggong, Anhar. 1986.
HCS. Tjokroaminoto. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hartisekar, Markonina, Akirin Isjani Abadi. 2001.
Mewaspada! Kuda Troya Komunisme.
Jakarta: Pustaka Sarana Kajian.
- Niel, Robert Van. 1960.
The Emergence Of Modern Indonesia Elite. Den Haag: N.V.Uitgeverij.
- Poeze, Harry A. 1988.
Tan Malaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pringgodigdo. 1991.
Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rickiefs. 1989.
Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Shiraishi, Takashi. 1990.
Zaman Bergerak. Jakarta: Grafiti.
- Wild, Colin dan Peter Carey. 1986.
Gekra Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Sagimun, dkk. 1986.
Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional.
Jakarta: Inti Idayu Press.